



## Intip Profil Djan Faridz dan Hartanya

- Kekayaan Berdasarkan LHKPN 2014**  
 Pada 2014, Djan Faridz melaporkan kekayaan Rp 91,1 miliar, termasuk 66 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 85 miliar di Jakarta dan Bogor.
- Rincian Kendaraan dan Harta Lainnya**  
 Djan memiliki kendaraan dengan total nilai Rp 513 juta, termasuk mobil Mercedes Benz 1985, Toyota Kijang Innova 2006, dan Nissan X-Trail 2006.
- Penurunan Kekayaan dari Tahun 2011**  
 Kekayaan Djan turun dari Rp 101 miliar pada 2011 menjadi Rp 91,1 miliar pada 2014.
- Jabatan Politik**  
 Djan Faridz aktif di politik, terpilih menjadi anggota DPD pada 2009, dan diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat 2011-2014. Ia juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2023 dan anggota Majelis Kehormatan PPP (2020-2025).
- Karier sebagai Pengusaha**  
 Djan memulai karier bisnisnya dengan mendirikan PT Dizamatra Powerindo pada 1996, yang berkolaborasi dengan Pertamina.

# Tanda Tanya Peran Djan Faridz di Kasus Masiku

**L**ima tahun berlalu dan buronan Harun Masiku belum juga tertangkap. Jalan panjang dan berliku tampak diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut. Kejutan terbaru, komisi anti-rasuah 'mengobok-obok' rumah politisi senior PPP Djan Faridz. Pengeledahan yang terletak di Jalan Borobudur No.26 Jakarta Pusat itu dilakukan oleh penyidik KPK Rabu (22/1/2025) malam. Barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik di sita dari kediaman mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Meski sudah dilakukan pengeledahan, Djan Faridz sebenarnya belum pernah diperiksa atau dimintai keterangan. Di kasus yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hasto dinilai melakukan perintangan penyidikan. Sementara untuk peran Djan Faridz, masih jadi tanda tanya hingga berita ini dibuat.

Baca Hal 11....

## Peran Para Tersangka di Kasus Harun Masiku



Hasto Kristiyanto



Donny Tri Istiqomah



Saeful Bahri



Wahyu Setiawan



Agustiani Tio Fridelina



Djan Faridz



Harun Masiku

- Ditetapkan Sebagai Tersangka
- Telah menjalani Hukuman
- Rumah digeledah
- Masih Buronan



Petugas KPK membawa koper saat melakukan pengeledahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (23/1/2025) dini hari. (Ist.antara)

# Menhub Usul WFA Sepekan Sebelum Mudik Lebaran

JAKARTA-Setelah libur Ramadan untuk anak sekolah dikedok, kini pemerintah mulai mengusulkan jadwal untuk pegawai dan tenaga kerja. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan ke Komisi V DPR, penerapan work from anywhere (WFA) sejak sepekan sebelum mudik lebaran.

Ini menjadi salah satu skema penanganan mudik lebaran 2025, terutama terkait kemacetan.

"Kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dari tanggal 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Mungkin kementerian dan pihak lain bisa memberlakukan WFA. Jadi mereka bisa bekerja darimana saja," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dalam rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Libur lebaran 2025 memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, ada banyak libur di akhir Maret. Berdasarkan SKB, ada libur Nyepi di 29 Maret 2025 dan Idul Fitri pada 31 Maret 2025. Ini belum termasuk cuti bersama yang juga sudah ditetapkan.

"Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret sepertinya agak sedikit challenging [menantang] mengingat kita hanya punya tiga hari itu mengurai pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang," tutur dia.

"Itu sebabnya kami akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Termasuk Bapak Presiden. Mohon izin ini kami belum sampaikan ke Bapak Presiden," imbuh dia.

Dudy berharap skema ini juga diikuti oleh perusahaan swasta lainnya. Bila ini bisa berjalan dengan baik, akan sangat membantu dalam mengurai potensi kemacetan pada puncak arus mudik.

"Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan yang mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat yang cukup banyak maka direkomendasikan pemerintah dan swasta mulai menerapkan WFA mulai 24 Maret. Hal ini dapat membantu mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama hari raya Nyepi," kata dia.

Terkait rencana ini, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, usulan ini perlu disikapi serius. Dia ingin semua instansi terkait segera berkoordinasi untuk mematangkan konsep ini.

"Agar jauh-jauh hari tersampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa dari segera menyusun dan waktu serta rencana kapan mereka mudik dan balik sehingga tidak menumpuk



dalam waktu yang sama. Libur panjang ini memungkinkan. Agar masyarakat dapat mengatur waktu lebih leluasa. Kami dukung Pak Menteri," ucap dia.

### Persiapan Jalan Fungsional Baru

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menhub Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

"Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail," ujar Dody, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini. "Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional

baru di sana sini," katanya.

Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang. Diantaranya memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalantol.

Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong

## LIBUR BERTIMPITAN NYEPI DAN LEBARAN 2025

-  **Tanggal 28 Maret 2025 (Jumat):** cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
-  **Tanggal 29 Maret 2025 (Sabtu):** libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
-  **Tanggal 30 Maret 2025 (Minggu):** libur akhir pekan
-  **Tanggal 31 Maret-1 April 2025 (Senin, Selasa):** libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah
-  **Tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin):** cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah

Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

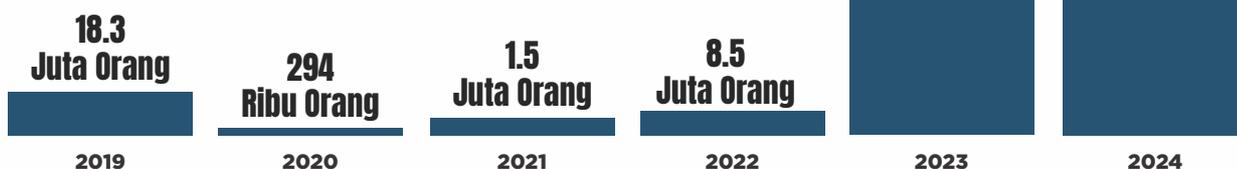
Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025. (din, wid rls, ant/dya)

## JUMLAH PEMUDIK SAAT LEBARAN DARI 2019-2024

Sumber : Kementerian Perhubungan RI



# UU BUMN Sudah Tua, DPR: Waktunya untuk Diubah

## POIN-POIN PERUBAHAN DALAM RUU BUMN

a. Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.

b. Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU eksisting.

c. Pengaturan terkait BP Danantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN.

d. Pengaturan terkait bisnis judgement rule yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dilakukan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

e. Pengaturan terkait sumber daya manusia di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris atau jabatan lainnya di BUMN.

f. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan bahwa anak perusahaan BUMN memberikan kontribusi yang maksimal bagi BUMN dan negara.

g. Pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan BUMN secara tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang lebih kompetitif, andal dan tangguh.

h. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN masyarakat dan negara.

i. Terkait penugasan khusus kepada BUMN oleh pemerintah yang salah satunya mengatur bahwa penugasan khusus pemerintah yang membutuhkan pendanaan dan atau secara finansial tidak layak, pemerintah harus memberikan pendanaan atas semua biaya yang akan diperlukan sebelum pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN.

j. Pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lainnya yang berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat.

k. Peraturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit dan komite lainnya.

l. Peraturan mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditentukan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh menteri untuk perum.

m. Peraturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, serta pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).ist



**JAKARTA**-Pemerintah dan DPR RI sepakat mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Sebab, undang-undang sebelumnya sudah berusia tua, lebih dari 22 tahun.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menyampaikan bahasan RUU BUMN sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025. Pembahasan ini menjadi perubahan ketiga yang langsung mengubah UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

"Regulasi ini perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional," kata Anggia dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Anggia menerangkan beberapa poin perubahan dalam RUU BUMN. Pertama, meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas perusahaan secara optimal sesuai perkembangan regulasi.

Kedua, pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan.

Ketiga, Pengelolaan Korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.

Keempat, berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan peluang bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

Kelima, privatisasi meliputi penentuan kriteria dan mekanisme privatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara.

Keenam, tanggung jawab sosial mencakup kewajiban BUMN untuk membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

"Selain itu, RUU ini juga menekankan pada pentingnya transparansi dan

tata kelola yang baik, termasuk pengawasan eksternal oleh akuntan publik serta pembentukan komite audit dan pengawasan internal," tegas Anggia.

Anggia menyampaikan RUU BUMN ini sebelumnya telah melalui tahap harmonisasi dan penyempurnaan konsep oleh Badan Legislasi DPR. Hasilnya telah diserahkan kepada Komisi VI DPR.

Pada rapat paripurna 23 Januari 2025, Komisi VI DPR secara resmi diberi mandat untuk membahas lebih lanjut RUU BUMN ini. Langkah terdekat, pihaknya akan membentuk panitia kerja.

"Kami akan segera membentuk panitia kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Komisi VI dan BUMN juga berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam proses legislasi ini," kata Anggia.

### Singgung Danantara

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pentingnya ada landasan aturan terbaru bagi perusahaan pelat merah. Rancangan Undang-Undang tentang BUMN (RUU BUMN) yang bakal digodok Komisi VI DPR RI nantinya turut berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Salah satu bagian pentingnya adalah penguatan peran dan kinerja BUMN. Dia menjelaskan, pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk memperbarui undang-undang tentang BUMN yang terakhir terbit pada 2003 lalu.

"Pada prinsipnya, pemerintah sepakat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, penguatan peran BUMN menjadi hal penting yang perlu

dilakukan. Baik dari pengelolaan entitas, maupun tata kelola di internal perusahaan negara.

"Optimalisasi peran dan kontribusi BUMN menjadi hal krusial untuk dilakukan penguatan pengelolaan BUMN, baik dari aspek entitas pengelolaan BUMN maupun dari aspek tata kelola BUMN itu sendiri," ungkapnya.

Erick melanjutkan, proses pembahasan RUU BUMN ini tak terlepas dari rencana pemerintah untuk membentuk superholding BUMN. Yakni, pembentukan BP Danantara sebagai salah satu target Presiden Prabowo Subianto.

"Dan juga untuk pembentukan badan baru, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)," jelas dia.

Sebagai informasi, rencana pembahasan RUU BUMN sebetulnya sudah berkali-kali masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas). Namun, pembahasannya tak kunjung dilakukan. Pada akhir masa jabatan periode 2019-2024 lalu, Erick Thohir sempat menyinggung kembali soal nasib pembahasan RUU BUMN ini di parlemen.

Erick menyebutkan, lahirnya BP Danantara sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sudah digulirkan dalam 2 tahun terakhir. Lahirnya Danantara, kata dia, tidak perlu dipandang negatif.

"Kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebetulnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana," kata Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

"Dan saya selalu bilang super holding itu, jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif. Jadi prosesnya sudah berjalan," ia menambahkan.

Dia menuturkan, nama dari super holding BUMN bukan merupakan suatu masalah. Hal itu jadi proses untuk menuju tujuan yang besar tadi.

Erick menyebut, bentuk Danantara nantinya masih akan dikaji, apakah sebagai badan usaha atau sovereign wealth fund (SWF). Termasuk pada sisi regulasi sebagai landasan kerja BP Danantara ke depannya.

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat, salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi ditanya sama, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini lagi proses kajian, apakah ada PP-nya, ada UU-nya, itu biar yang ahlinya," bebernya. (din, rls, ant, wid/dya)



# Inpres Pertama Prabowo: Pemda Potong Perdin 50% hingga Batasi Seminar

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepala daerah untuk meng-hemat anggaran hingga Rp50,59 triliun dalam APBD 2025.

Perintah tersebut Prabowo sampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

Dalam diktum keempat Inpres 1/2025, Prabowo memberi tujuh poin instruksi kepada gubernur dan bupati/wali agar penghematan APBD 2025 bisa terwujud. Instruksi-instruksi tersebut seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorium, hingga Batasi acara-acara seremonial seperti seminar.

Bahkan, dalam diktum kelima angka 2, Prabowo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Titip Karnavian untuk memantau pelaksanaan penghematan APBD 2025 di tingkat pemerintah daerah (pemda). Terakhir, dalam diktum keenam, Prabowo juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 itu.

"Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan," dikutip dari Inpres, Kamis (23/1/2024).

Artinya instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Secara total, Presiden Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun pada Tahun Anggaran 2025.

Angka ini terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja



Presiden Prabowo Subianto

elayanan publik.

Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Prabowo meminta kepada menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan indentifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

## Buka-bukaan Mensesneg

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan penghematan belanja itu. Prasetyo mengatakan, Prabowo telah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan. Efektivitas belanja negara harus lebih dipertajam untuk tujuan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," sebut Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah,

Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Dia mengungkapkan, Prabowo sudah sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, ataupun studi banding dikurangi.

"Yang disampaikan Presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi, kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," beber Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan kemungkinan model penghematan yang dilakukan mirip automatic adjustment yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa anggaran 'dibintangi' atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya," sebutnya ketika dikonfirmasi apakah penghematan akan melakukan pemangkasan atau hanya dibintangi.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo juga menegaskan sejauh ini tak ada penolakan yang disuarakan K/L. Menurutnya, semua K/L satu suara untuk melakukan penghematan.

"Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, nggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," sebut Prasetyo. (din, ant, wid, rls/dya)



Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,"

**Prasetyo Hadi**  
Menteri Sekretaris Negara

## 7 Poin Instruksi Prabowo ke Kepala Daerah dalam Inpres 1/2025:

- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen)
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
- Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
- Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b.

## Detil Efisiensi Anggaran

Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 306.695.177.420.000 (Rp 306,69 triliun)** terdiri:

- Efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 256.100.000.000.000 (Rp 256,1 triliun)**
- Efisiensi transfer ke daerah sebesar **Rp 50.595.177.420.000 (Rp 50,59 triliun)**.



# Saat MUI Akui Berminat Kelola Tambang

**JAKARTA**-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan minat untuk mengelola tambang seperti yang diterima oleh ormas keagamaan. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, syaratnya harus pertambangan yang ramah lingkungan.

Dia menjelaskan, mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) dan melaksanakan pertambangan ramah lingkungan sesuai fatwa MUI, maka peluang mengelola pertambangan harus dimanfaatkan.

Menurut dia, MUI dan ormas keagamaan siap menerima peluang jika akan ada tawaran mendapatkan konsesi pertambangan. Sebab, MUI juga merupakan bagian dari rakyat.

“Bagaimana dengan UMKM, masyarakat ormas, yang akan diberikan pengolahan tambang? Kalau dia dilakukan secara aturan perusahaan terbatas, punya SDM, punya keahlian, dalam fatwa MUI kita tegaskan, yaitu pertambangan yang ramah lingkungan. Kenapa tidak? Why not?” kata Amirsyah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dia menanggapi pertanyaan kenapa MUI ingin mengelola tambang, menurut dia hal ini tidak berkaitan dengan jatah anggaran MUI, meskipun dia juga tidak menampik jatah anggaran tersebut terbilang kecil.

Namun menurut dia hal ini merupakan langkah MUI agar mandiri, profesional, bertanggung jawab, demi memajukan negara ini.

“Karena selama ini dikelola pengusaha pengusaha uangnya gak tau ke mana, tapi kalau ke ormas percaya harus punya banyak sekolah punya banyak rumah banyak fakir miskin anak yatim yang telantar kita urus. Dengan segala persyaratan, aturan dan kriteria, kita siap,” imbuhnya.

Kemudian dia juga menegaskan, dalam revisi UU Minerba ini, jika ulama diberi peluang untuk mengelola tambang, maka ulama harus menjadi contoh dan teladan bagi rakyat.

Dukungan terhadap revisi UU Minerba ini diberikan MUI, lanjut Amirsyah sebab adanya ketimpangan di Indonesia, padahal memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Dia juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2023 Tahun 2022 Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.



PBNU sudah dapat jatah dari pemerintah yakni tambang eks Bakrie Group yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC). (ist.ilustrasi)

Menurut dia, dalam putusan tersebut kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikuasai oleh semua rakyat, bukan hanya sekelompok orang saja.

“Nah sekarang, selanjutnya, keterlibatan masyarakat, perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidaklah dilarang, atau bertentangan dengan undang-undang negara, Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang memberikan manfaat yang besar, bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Amirsyah juga tidak menampik usaha pertambangan adalah usaha yang penuh risiko. Namun menurut dia, jika tidak berusaha bagaimana akan menjadi ahlinya, sebab yang salah adalah pihak yang merasa takut sebelum berusaha.

## Disentil Pernah Mengharamkan

Anggota fraksi Partai Golkar, Umu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyentil organisasi massa Islam yang sebelumnya menyebut tambang itu haram, namun kini berbalik ketika mendapatkan jatah konsesi tambang oleh pemerintah.

“Saya punya data MUI itu pernah mengatakan bahwa tahun 2011, sekarang sudah tidak ada haram lagi kalau dapat, kan begitu,” kata Umu Kabunang Rudi Yanto Hunga dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama MUI, PUI, Walhi dan Kementerian ESDM, membahas revisi UU Minerba, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (23/1/2025).

“NU juga begitu. Dulu pernah mengatakan (tambang) haram 2015. 2024 sudah tidak lagi. Muhammadiyah begitu juga, dulu pernah mengatakan haram juga. Sekarang tidak lagi,” singgungnya lagi.

Ia justru mengusulkan agar pemerintah hanya memberikan saham saja, berupa saham pemberdayaan manusia untuk mengelola tambang.

“Di saham itu adalah hak, itu hak dalam pembentukan perseroan

terbatas,” katanya.

Selain itu, Umu menambahkan, perguruan tinggi juga harus berpikir panjang untuk mengelola tambang, lantaran membutuhkan perseroan terbatas (PT).

“Kalau mengerjakan tambang kan butuh perseroan terbatas, pak. Supaya tidak dirubah lagi UU Yayasan, UU Universitas, UU Yayasan dan Perguruan tinggi lainnya. Ini perlu dipersiapkan, pak begitu, daripada nanti terseok-seok,” tutupnya.

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menegaskan, MUI memfatwakan hal yang merusak termasuk dalam hal ini tambang. Namun jika tambang ramah lingkungan maka sebaliknya.

“Kita mau yang maslahat, semua pihak harus bertanggung jawab, kita kerahkan SDM kita dengan segala high regulated. Kita punya human resource kenapa tidak? Jadi kita tidak akan sama mengelola tambang yang dulu rusak dengan yang akan diberikan kepada ormas,” tutup Amirsyah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola oleh Muhammadiyah, sebab masih dalam kajian.

“Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassador Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Julian menyampaikan, Kementerian ESDM masih mendalami berapa besar cadangan batu bara yang tersedia di wilayah tersebut. Saat ini, kata Julian, Kementerian ESDM baru mendapatkan indikasi awal perkiraan cadangan, namun belum mengetahui besaran cadangan secara pasti.

“Untuk itu, penerima IUP itu wajib melakukan eksplorasi dengan jangka

## Pasal yang Dinilai Bermasalah dalam RUU Minerba

**1. Pasal 51 ayat (1)** di mana Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau Perusahaan perseorangan dengan cara Lelang atau dengan cara pemberian prioritas.

**2. Pasal 51A ayat (1)** WIUP Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

**3. Pasal 51B ayat (1)** WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

**4. Pasal 75 ayat (2)** Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

waktu paling lama 7 tahun,” kata Julian.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

Akan tetapi, Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi menyampaikan bahwa hingga saat ini, organisasinya belum menerima SK soal pemberian bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

Sementara itu, Kemendikisaintek menyatakan siap terlibat dalam wacana pemberian izin usaha pengelolaan (IUP) tambang untuk perguruan tinggi yang digodok DPR melalui RUU perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (revisi UU Minerba).

Sejken Kemendikisaintek Togar M Simatupang menilai usulan tersebut sesuai dengan kebijakan pendidikan tinggi yang diharapkan mandiri dalam mencari pembiayaan..(din, wid, ist, rls/dya)

# Pedagang Pasar Besar Ajukan Syarat Revitalisasi ke Pemkot Malang: Tak Bayar hingga Posisi Kios

**MALANG** - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk merevitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) mendapat respons positif dari sebagian besar pedagang. Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) yang sebelumnya cenderung menolak pembongkaran total kini menyatakan kesepakatan. Namun, mereka mengajukan beberapa syarat.

Wakil Ketua Hippama, Muhammad Sultan Akbar, mengungkapkan, pedagang menuntut adanya jaminan dari Pemkot terkait hal-hal penting.

"Ketua dan saya sudah sepakat. Hanya saja kami meminta adanya klausul, ada MoU kalau memang nanti tak bayar. Melibatkan kejaksan, wali kota. Kemudian bedak (kios, red) akan kembali ke posisi semula dan tidak ada penambahan pedagang. Artinya dari 4.530, tetap itu," ujar Wakil Ketua Hippama, Muhammad Sultan Akbar, Kamis (23/1/2025).

Akbar juga menjelaskan, kondisi Pasar Besar Malang yang telah berusia 35 tahun sangat memprihatinkan. Banyak bagian pasar yang sudah rusak parah dan tidak layak diperbaiki dengan hanya direnovasi.

Ia menambahkan, jika pasar terus dibiarkan tanpa ada revitalisasi, pedagang akan menghadapi kesulitan di masa depan.

"Kalau hanya direnovasi, apa yang mau direnovasi? Itu sudah rusak. Kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki dengan renovasi. Apalagi Pj sekarang ini kan orang pusat. Jadi kalau mau mendapatkan dana bantuan kan lebih cepat," tambahnya.

Meskipun mengaku telah setuju dengan rencana pembongkaran total, menurutnya pedagang PBM akan tetap mengajukan beberapa syarat. Akbar menekankan pentingnya jaminan letak bedak yang tetap berada di posisi semula setelah revitalisasi. Serta tidak ada penambahan jumlah pedagang di dalam pasar nantinya.

Selain itu, pedagang juga menuntut agar revitalisasi pasar tidak membebani mereka dengan biaya tambahan. Akbar menegaskan, Pemkot harus memastikan saat proses relokasi, biaya sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, mengingat pasar ini akan dibangun dengan dana dari APBN.

Akbar juga menjelaskan, beberapa



pedagang yang masih belum setuju terkait rencana revitalisasi, mengaku revitalisasi yang dilakukan justru akan mempersempit pasar dan posisi bedak jualan mereka.

"Isu sempat beredar kalau jadi direvitalisasi, pasarnya dipersempit. Nah mereka yang menolak itu acuannya (revitalisasi) Pasar Dinoyo. Tetapi Pak Eko (Kepala Diskopindag Kota Malang) sudah janji nanti tempatnya tetap, tinggi-nya juga tetap.

Dalam artian, tinggi sampai 5 meter. Kalau Pasar Dinoyo kan rendah, jadinya panas," terangnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat pertemuan dengan seluruh anggota Hippama akan kembali dilakukan untuk menyatukan suara. Pihaknya juga berharap agar Pemkot Malang semakin mengoptimalkan sosialisasi kepada para pedagang, serta segera membuat kesepakatan dengan para pedagang. (Santi/Dya)

## Pemkot Batu Benarkan Tak Ada Incinerator Baru untuk Pengelolaan Sampah



diambil untuk memperkuat peran Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan Kota Batu.

"Jadi di 2025 ini kami ingin ada fokus di pendampingan masyarakat. Di 2024 kemarin kan juga sudah ada pengadaan incinerator. Tahun ini penambahan incinerator tidak masuk ke proyek strategis daerah (PSD)," ujar Alfi, Kamis (23/1/2025).

**BATU** - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan tidak ada penambahan mesin incinerator pada tahun 2025 ini. Sebagai gantinya, upaya pengelolaan sampah akan difokuskan pada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Plt Kepala DLH Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengatakan, langkah ini

Alfi menjelaskan, pendampingan ini akan melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat di setiap desa dan kelurahan, terutama wilayah yang telah memiliki TPS 3R. Harapannya, masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan sampah di lingkungannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai komunitas agar bersama-sama mendampingi TPS 3R di masing-masing desa," tambahnya.

Saat ini, Alfi menyebutkan Kota Batu telah memiliki 5 mesin incinerator yang tersebar di beberapa lokasi. Tiga unit berada di TPA Tlekung, Kecamatan Junrejo, satu unit di TPS 3R Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, dan satu lagi di TPS 3R Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.

Untuk diketahui, pengadaan 3 incinerator di TPA Tlekung pada tahun 2023 menelan anggaran hingga Rp 12 miliar, dengan biaya per unit mencapai Rp 4 miliar.

Alfi menilai, saat ini fasilitas tersebut telah cukup memadai untuk menangani sampah yang ada. Namun, ke depan dirinya tak menutup kemungkinan akan menyusun skema secara bertahap untuk pengadaan incinerator di setiap kecamatan.

Lebih lanjut, dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara langsung, Alfi berharap keberadaan mesin incinerator semakin efektif dalam

pengelolaan sampah. Pasalnya jika dioptimalkan dengan baik, masing-masing mesin mampu membakar hingga 15 ton sampah per hari dengan suhu panas yang dapat diatur antara 400 hingga 800 derajat, tergantung pada kondisi sampah kering atau basah.

"Jadi sampah ini harus dianggap sebagai tantangan yang harus diselesaikan bersama. Nah fokusnya makanya lebih ke pendampingan, edukasi," paparnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menegaskan pentingnya mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah. Menurutnya, mengubah pola perilaku masyarakat terhadap sampah tidaklah mudah, tetapi harus dilakukan secara konsisten.

"Butuh sosialisasi masif, keuletan, dan kesabaran untuk menggerakkan masyarakat agar mampu mengelola sampah secara mandiri. Kami terus memperkuat keberadaan TPS 3R di masing-masing wilayah dengan menguatkan peran masyarakatnya," kata Aries. (Santi/Dya)

# Kebakaran Hebat di San Diego, 200 Km dari LA



Penampakan titik api Lilac Fire di kebakaran San Diego, Negara Bagian California, Amerika Serikat, Selasa (21/1/2025). Titik api ini hanya berjarak tak sampai tiga jam perjalanan dari kebakaran Los Angeles. (AFP)

**SAN DIEGO** - Kebakaran hutan juga melanda San Diego County, Negara Bagian California, Amerika Serikat, Selasa (21/1/2025), yang hanya berjarak 200 kilometer (km) dari Los Angeles..

Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat (AS) memperingatkan kebakaran di San Diego, California Selatan bisa meluas.

Hal ini karena tingkat kelembapan yang rendah serta angin Santa Ana yang berembus kencang di daerah tersebut.

Dikutip dari USA Today, peringatan merah berlaku hingga Kamis (23/1/2025) malam untuk sejumlah daerah.

Di antaranya San Diego, Los Angeles, Ventura, San Bernardino hingga Riverside.

Badan Cuaca Nasional memprediksi kecepatan angin Santa Ana di San Diego bisa mencapai 120 kilometer per jam.

"Jika terjadi kebakaran, kondisinya mendukung terjadinya perilaku kebakaran ekstrem dan pertumbuhan api yang cepat, yang dapat mengancam jiwa dan harta benda," kata Badan Cuaca.

Beberapa titik api muncul, memicu perintah evakuasi, penutupan sekolah, dan pemadaman listrik.

Sejauh ini, menurut laporan USA Today, belum diketahui penyebab kebakaran San Diego.

Titik api terbesar di kebakaran San Diego adalah Lilac Fire yang luasnya mencapai 85 hektare.

Sebanyak 86 penduduk di Bonsall, permukiman kecil di utara San Diego harus dievakuasi. Api turut merusak dua bangunan.

Lebih dari 200 petugas pemadaman kebakaran dikerahkan, dan sukses memadamkan 50 persen

kobaran api.

Sementara itu, titik api Pala Fire di wilayah permukiman Pala Mesa menghancurkan 17 hektare lahan.

Perintah evakuasi sempat diumumkan, tetapi dicabut setelah damkar menghentikan laju api sepenuhnya pada sore hari.

Titik api ketiga adalah Riverview Fire yang membakar satu hektar lahan sebelum padam, sedangkan yang keempat disebut Friars Fire di dekat perumahan dan pertokoan kawasan Mission Valley.

San Diego Fire-Rescue mengatakan, api di Friars Fire membakar 15-20 hektare, tetapi kini telah dijinakkan. Perintah evakuasi dan peringatan di area tersebut juga sudah dicabut.

Kebakaran San Diego terjadi saat badai angin bertiup melintasi South California sepanjang malam dan dini hari, menurut laporan awal dari National Weather Service.

Embusan angin berkecepatan 164 km per jam tercatat di pegunungan San Diego pada Senin (20/1/2025) sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Hingga Selasa (21/1/2025) sore, lebih dari 64.000 rumah dan tempat usaha tidak teraliri listrik di Ventura, Los Angeles, San Diego, dan Riverside, menurut data PowerOutage.us. (USA Today,ist/nei)

## Trump: AS Tak Berdaya

**LOS ANGELES** - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik penanganan kebakaran hutan Los Angeles, California. Dia menyebut cara penanganan kebakaran tersebut menunjukkan AS sebagai negara lemah.

Kebakaran Los Angeles tak kunjung usai sejak 7 Januari 2025, bahkan muncul kebakaran baru Hughes Fire yang melahap area seluas 3.750 hektare. Kebakaran yang baru ini terjadi saat dua bencana besar lainnya, Eaton dan Palisades Fire, belum bisa dikendalikan.

"Kebakaran ini berkobar hebat, lalu menjangar ke area lain, area lain, area lain," kata Trump kepada Fox News, seperti dikutip Kamis (23/1/2025).

Namun Trump juga mengakui, kebakaran Los Angeles kali ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Butuh waktu 1,5 minggu (untuk mengendalikan sebagian kebakaran) dan saya belum pernah melihat yang seperti ini. Negara kita seperti tidak berdaya," tuturnya.

Presiden ke-47 AS yang baru dilantik pada 20 Januari lalu itu melanjutkan, kebakaran membuat beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di AS tak berdaya. Mereka hanya pasrah kehilangan rumah.

Kebakaran terbaru membara di Los Angeles County, melahap



Presiden AS Donald Trump berbicara saat menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, DC, pada 20 Januari 2025. (EPA)

pepohonan dan semak belukar seluas 3.750 hektare. Otoritas Los Angeles mengeluarkan perintah evakuasi kepada lebih dari 50.000 warga.

Hughes Fire terjadi di daerah Danau Castaic yang terletak sekitar 80 km sebelah utara Kota Los Angeles.

Robert Jensen, pejabat di Departemen Sheriff Los Angeles County mendesak semua warga di daerah terdampak kebakaran untuk segera mengungsi guna menghindari jatuhnya korban sebagaimana dialami dalam enam kebakaran Los Angeles lainnya.

Kebakaran kali ini juga diperparah oleh tiupan kencang angin kering Santa Ana. Angin juga mendorong gumpalan asap dan bara ke area lain yang mempercepat laju

api.

Belum diketahui pasti apa penyebab Hughes Fire. Namun api muncul di tengah kondisi angin kencang dan kelembapan udara rendah. Kondisi itu sangat cocok untuk penyebaran api yang cepat.

Dua kebakaran terbesar yakni Eaton dan Palisades Fire menewaskan 28 orang serta membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Dinas pemadam kebakaran California Cal Fire menyatakan, hingga Rabu (22/1/2025) waktu setempat kebakaran Eaton Fire terkendali 91 persen dari total 5.674 hektare lahan yang terbakar. Sementara Palisades Fire, yang telah melahap 9.489 hektare, telah terkendali hampir 70 persen. (Al Jazeera, Fox News,ist/nei)

# Dokter Tirta : Begadang Bisa Picu Stroke

**BEGADANG** dan kurang tidur ternyata dapat membahayakan kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan risiko terkena stroke akibat terganggunya sistem peredaran darah dan tekanan darah yang tidak stabil. Pernyataan tersebut bukanlah mitos belaka, melainkan sebuah fakta.

Topik ini dibahas dr Tirta di Youtube CURHAT BANG Denny Sumargo, dikutip Senin (20/1/2025). Dr Tirta menjelaskan, potensi risiko stroke akibat begadang terjadi karena peningkatan tekanan darah.

Tirta mengatakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat pembuluh darah elastis yang bertugas mengganti sel-sel yang rusak saat dalam posisi tidur.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembuluh darah arteri mengalami dua proses, yaitu pembuluh darah melebar (Vasodilatasi) dan pembuluh darah menyempit (Vasokonstriksi). Ketika pembuluh darah mengalami proses Vasodilatasi, tekanan darah akan mengalami

penurunan. Ketika pembuluh darah mengalami Vasokonstriksi, tekanan darah akan mengalami peningkatan.

Selain itu, pembuluh darah juga bertugas mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh saat manusia tidur. Namun, pembunuh darah tersebut akan kaku jika tidak tidur atau dalam kondisi begadang.

Jika hal itu terjadi secara terus-menerus selama belasan tahun, maka pembuluh darah menjadi kaku dan bertabrakan di dalam dan membentuk gumpalan. Saat sedang stress, gumpalan tersebut dapat menggelinding ke pembuluh darah besar ataupun kecil.

Dr Tirta mengatakan, stroke bisa terjadi jika gumpalan tersebut menggelinding ke pembuluh darah kecil yang terdapat pada otak dan jantung.

Gumpalan yang tersumbat pada otak bisa

menyebabkan stroke.

Mungkin Anda berpikir bahwa hubungan antara begadang dan stroke terlalu jauh atau berlebihan. Apa memang separah itu? Ya. Bahkan, kekurangan tidur menimbulkan dampak yang langsung terasa pada tubuh, seperti:

Gampang lapar dan bikin makan lebih banyak. Anda juga akan cenderung memilih makanan yang tinggi kalori dan tinggi karbohidrat.

## Rentan mengalami kecelakaan.

Meski hanya satu malam begadang, koordinasi Anda dalam menyetir bisa berantakan.

## Kusam

Sebuah studi kecil menyebutkan bahwa kurang tidur dapat membuat Anda kurang menarik dan tampak lebih sedih.

## Lebih mudah emosi.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang kurang tidur, pusat emosi dalam otaknya menjadi 60% lebih reaktif.

## Sulit konsentrasi dan mudah lupa.

Anda tiba-tiba tak ingat kalau hari ini ada rapat pagi? Mungkin begadang yang jadi biang keladinya.

Bagaimana dengan efek jangka panjangnya? Selain penyakit jantung dan stroke, berikut hal-hal yang dapat terjadi jika Anda sering begadang:

Obesitas. Bayangkan, begadang sehari saja sudah bikin Anda lupa daratan kalau makan, apalagi kalau dilakukan terus-menerus sepanjang waktu?

Beberapa tipe kanker, di antaranya kanker payudara dan kanker kolorektal.

Diabetes. Kurang tidur terkait dengan penurunan sensitivitas insulin, faktor risiko diabetes.

Jumlah sperma menurun. Sebuah studi tahun 2013 menemukan bahwa pria dengan tingkat gangguan tidur yang tinggi memiliki

konsentrasi sperma 29 lebih rendah dalam air mani mereka.

Kematian. Ini mungkin mengerikan, tapi sebuah penelitian mengungkap bahwa pria yang tidur kurang dari enam jam memiliki peningkatan risiko kematian yang signifikan.

Diketahui Sleep Foundation memiliki penjelasan yang lebih detail. Menurut mereka, ada tiga alasan yang membuat begadang bisa jadi penyebab stroke:

## 1.Menaikkan tekanan darah

Selama tidur normal dan sehat, tekanan darah secara alami bisa turun sekitar 10–20 persen. Sedangkan saat seseorang begadang atau terjaga semalaman, tekanan darah tidak mengalami penurunan. Akibatnya, tekanan darah naik yang kadang menyebabkan hipertensi.

Kondisi ini bakal sangat membahayakan bila terjadi dalam waktu yang lama karena dapat mengurangi aliran darah ke otak, meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, sampai penyakit ginjal. Risiko stroke ini bisa meningkat pesat bila kebiasaan begadang di malam hari ditambah dengan kondisi stres berlebihan di siang hari.

## 2.Meningkatkan gula darah

Banyak faktor yang bisa memicu kadar gula darah naik. Kurang tidur menjadi salah satunya. Saat begadang, metabolisme glukosa atau gula darah di dalam tubuh terganggu. Akibatnya, gula darah bisa melonjak.

Kadar gula darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah, termasuk di otak dan jantung. Kondisi ini membuat penderita diabetes memiliki peluang terkena atau meninggal karena stroke dan penyakit jantung dua kali lebih tinggi dibandingkan orang dengan kadar gula darah normal.

## 3.Memicu obesitas

Aktivitas tidur yang normal dan berkualitas juga dapat membantu menjaga keseimbangan hormon yang mengontrol rasa lapar. Saat begadang dan kurang tidur semalaman, seseorang jadi kesulitan mengendalikan rasa lapar dan mudah tergoda untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori pada tengah malam atau dini hari. Kondisi bisa membuat kalori menumpuk di dalam tubuh dan memicu obesitas. I(nei,ist/dya)



**DR. TIRTA**

# Brand China Geely Masuki Industri Otomotif Indonesia

**JENAMA** otomotif asal China, Geely, resmi memasuki pasar Indonesia, menambah daftar merek China yang semakin meramaikan dan memperketat persaingan di industri otomotif Tanah Air.

Pada awal tahun ini saja, sudah ada Jaecoo dan Denza yang masuk ke pasar otomotif Indonesia. Keduanya merupakan sub-brand dari Chery dan BYD, yang menyasar kelas premium.

## 1. Geely Resmi Meluncur

Geely resmi masuk ke Indonesia pada Rabu (22/1/2025). Untuk permulaan, Geely menghadirkan mobil listrik EX5.

Vice President of Geely Auto International Corporation, Evin Ye mengatakan, pihaknya sangat antusias atas peluncuran Geely di Indonesia. Pihaknya meyakini Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat mobilitas pintar dan berkelanjutan.

"Geely hadir untuk menawarkan solusi mobilitas yang mengutamakan teknologi, keberlanjutan, dan pengalaman berkendara yang tak terlupakan," kata Evin Ye, saat peluncuran brand Geely, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Geely juga memperkenalkan Geely EX5 sebagai model pertama yang diluncurkan untuk pasar Indonesia.

"Geely EX5 merupakan langkah awal dari komitmen kami dalam menghadirkan kendaraan yang menggabungkan teknologi canggih,



dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen Indonesia," ujar CEO Geely Auto Indonesia, Victor Gao.

## 2. Rencana Bangun Pabrik

Geely berencana mendirikan pabrik Knock-Down (KD) untuk produksi kendaraan lokal. Fasilitas ini untuk memproduksi kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

Selain itu, kehadiran pabrik dapat lapangan kerja dan memberikan dampak positif pada ekosistem manufaktur Indonesia.

Victor Gao menyebut, Indonesia punya peran penting bagi Geely untuk mendorong mobilitas cerdas yang berkelanjutan. Ia menyebut, permintaan soal mobilitas modern juga akan semakin meningkat.

"Dengan populasi yang semakin

besar dan permintaan pasar terhadap solusi mobilitas modern yang terus meningkat, kami yakin Geely dapat menjadi bagian utama dalam transformasi industri otomotif Indonesia," ujar Victor Gao.

## 3. Geely Rakit Mobil Listrik di Pabrik Handal

Diketahui, Geely Auto akan kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia. Brand Geely akan meluncur pada di Tanah Air pada Rabu (22/1/2025).

Dengan dimulainya operasi pabrik ini pada kuartal 3 2025, konsumen dapat memperoleh model EX5 yang dirakit secara lokal di Indonesia.

Managing Director Geely Auto Indonesia, Victor Gao menjelaskan, Geely akan memasuki pasar Indonesia dengan model listrik murni serta memanfaatkan matriks produk multi-merek yang mencakup berbagai

kategori dan harga.

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berencana untuk memperkenalkan 5-7 model, termasuk SUV, MPV, BEV, PHEV, dan ICE, guna memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar," ujar Victor Gao, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

Melalui kesepakatan ini, Geely akan memperkenalkan teknologi baterai terbaru dan metode perakitan canggih, sekaligus mendorong pertukaran pengetahuan antara tim Indonesia dan China. Kemitraan ini juga mendukung pengembangan rantai pasok baterai daya di Indonesia.

## 4. Geely EX5

Kemitraan ini akan berfokus pada peningkatan upaya lokalisasi. Produksi awal mencakup model Geely EX5, dengan rencana untuk memperluas produksi ke model Battery Electric Vehicles (BEVs), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), dan Internal Combustion Engine (ICE).

Gao menjelaskan, kemitraan ini mencerminkan komitmen pihaknya terhadap pasar Indonesia. Pihaknya memiliki visi bersama untuk mencapai pertumbuhan dan inovasi serta mendukung pengembangan lokal.

"Dengan menggabungkan kemajuan teknologi Geely dan keahlian manufaktur Handal, kami yakin kolaborasi ini akan merevolusi standar produksi otomotif di Indonesia," tutur Gao. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
**REDAKTUR** LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO:** SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Koridor Vasari

## Lorong Rahasia Elite Italia

ADA banyak tempat unik di dunia yang mungkin belum terjamah traveler. Di Italia contohnya, ada satu lorong rahasia yang baru dibuka untuk umum setelah 'tersembunyi' cukup lama. Lorong rahasia ini membentang melewati salah satu lanskap paling terkenal di Italia.

Dilansir CNN Travel, sempat digunakan para kaum elite Italia, Koridor Vasari atau Corridoio Vasariano dibuka untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Bukan sembarang koridor biasa, ini adalah jalur pejalan kaki pribadi yang melalui pusat kota Florence atau Firenze, Italia. Dirancang dan dibangun oleh seniman dan arsitek

Italia, Giorgio Vasari, lorong sepanjang 750 meter ini dibangun untuk para penguasa dinasti Medici yang berkuasa pada tahun 1565.

Jalan setapak tersebut--yang dibangun hanya dalam waktu lima bulan untuk Cosimo I de' Medici--ini menghubungkan tiga tempat paling terkenal di Florence: Palazzo Vecchio (pusat politik kota), Galeri Uffizi (dulu kantor para penguasa, atau "uffici"), dan Palazzo Pitti, tempat tinggal keluarga bangsawan Italia.

Jalan ini memungkinkan mereka untuk bepergian antara rumah dan kantor, tanpa diganggu oleh masyarakat umum atau diserang oleh musuh-musuh mereka.

Kini, lorong rahasia tersebut menawarkan pengalaman melintasi beberapa area paling terkenal di Florence dengan pemandangan yang memukau, tetapi tidak ada keramaian seperti yang akan kamu temukan di luar.

Saat para wisatawan memadati kawasan Ponte Vecchio salah satu jembatan ikonik abad pertengahan yang populer di Florence, mereka yang berada di koridor rahasia ini bisa melewatinya tanpa hambatan dan bisa menikmati pemandangan yang sama. Ini karena posisi koridornya yang lebih tinggi dari jalan tersebut, jalan setapak ini membentang di atas gedung-gedung, istana, menara dan bahkan di sepanjang puncak Ponte Vecchio.

Bagian utama koridor, yang membentang dari Uffizi ke Taman Boboli di luar Palazzo Pitti, dibuka untuk umum pada hari Jumat.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah oadolfrang biasa dapat mengaksesnya. Selama berabad-abad, koridor ini merupakan jalan rahasia milik Adipati Agung Tuscany, bahkan staf mereka sekalipun tidak dapat melewatinya.

Dalam beberapa dekade terakhir, koridor ini dibuka bagi mereka yang bersedia

membayar biaya mahal untuk akses eksklusif, tetapi pada tahun 2016, koridor ini ditutup karena alasan kerapuhan dan keselamatan. Kini, mereka yang membeli tiket seharga 20 euro akan ditemani dalam kelompok yang terdiri dari 25 orang. Sambil terus berjalan, akan ada waktu untuk berfoto.

### Melewati Koridor Vasari di Italia

Koridor ini membentang dari lantai dua Uffizi, tempat sebuah pintu menuntun pengunjung menuruni 58 anak tangga menuju ruang berdingding tinggi dengan lukisan dinding.

Dari sana, koridor ini menurun lagi menjadi koridor: jalan setapak tertutup, dilapisi batu bata terakota, dengan jendela berlubang yang menghadap ke jalan-jalan di sebelah kanan, dan jendela persegi besar setiap empat kaki atau lebih, yang menghadap ke sungai Arno.

Kemudian, koridor ini membentang di sepanjang puncak Ponte Vecchio, dengan serangkaian jendela panorama di tengahnya, yang ditambahkan oleh diktator Benito Mussolini — yang akan mengawal Adolf Hitler yang terpesona melalui koridor tersebut. Hitler kemudian menyelamatkan Ponte Vecchio sementara ia menghancurkan semua jembatan Florence lainnya selama Perang Dunia II.

Meninggalkan Ponte Vecchio, koridor tersebut kemudian melingkari menara abad pertengahan, melalui atap gereja, dan keluar ke Taman Boboli, di samping Grotta del Buontalenti, sebuah fitur air abad ke-16.

Pengunjung kemudian akan diantar ke Palazzo Pitti, di mana mereka dapat melanjutkan kunjungan mereka sendiri (dengan tik

et) atau keluar melalui halaman besar. Ada total 106 anak tangga yang harus dinaiki selama perjalanan, meskipun tidak perlu menaikinya lagi, dan ada lift tangga untuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Direktur Uffizi, Simone Verde mengatakan bahwa koridor tersebut adalah "tempat mistis bagi dunia Barat" yang sebelumnya "hanya sedikit yang bisa masuk."

"Itu adalah titik tumpu yang menghubungkan benteng Medici di Florence. Kami menyebutnya sebagai kota paralel di dalam kota," katanya. Dulu koridor ini dipenuhi lebih dari 1.000 karya seni dari abad ke-18 dan seterusnya, termasuk koleksi potret diri yang banyak, tetapi kini dindingnya kosong yang menciptakan kembali nuansa bangunan asli tahun 1500-an.

Untuk saat ini, pengunjung akan menikmati pemandangan kota dari sudut yang hanya dinikmati oleh kalangan elite, saat mereka mengintip melalui jendela hotel dan kantor, berjalan di atas kerumunan di Ponte Vecchio, dan mengintip ke dalam gereja Santa Felicita, yang tidak terlihat oleh siapa pun di bawahnya, seperti yang pernah dilakukan keluarga Medici.

Tidak ada panel yang menjelaskan sejarah dan pendamping rombongan tidak akan memberikan tur berpemandu, jadi pengunjung yang ingin melakukan lebih dari sekadar mengagumi pemandangan perlu membaca sejarah sebelum berkunjung.

Bagi kamu yang ingin masuk ke koridor sekaligus galerinya tiketnya dibanderol sekitar 43 euro atau sekitar Rp 726 ribu.(nei,ist/dya)



**Tanda Tanya Peran ... (dari Hal 1)**

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba melakukan penggeledahan berkaitan dengan kasus Harun Masiku di salah satu rumah di Menteng, Jakarta Pusat, yang ternyata milik mantan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Penggeledahan ini ternyata membuat jajaran PPP terkaget-kaget.itolak? Kalau ditolak, prosesnya kira-kira satu bulan setelah itu bisa dilantik," tuturnya.

Penggeledahan ini dilakukan KPK pada Rabu (22/1/2025) malam. KPK membenarkan penggeledahan terkait kasus Harun Masiku.

"Benar ada giat penggeledahan perkara tersangka HM (Harun Masiku)," kata jubi KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Tessa juga membenarkan rumah tersebut milik Djan Faridz. "Info terupdate rumah Djan Faridz," imbuhnya.

Djan Faridz pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Joko Widodo pada 2023. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

KPK di rumah Djan Faridz berlangsung lama. Berdasarkan pantauan, KPK masuk ke rumah Djan Faridz pada Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB.KPK baru keluar dari rumah tersebut, Rabu (23/1/2025), pukul 01.05 dini hari.

Para penyidik KPK menenteng koper masing-masing dua berwarna hitam, satu koper warna biru dongker. Sedangkan tas jinjing yang dibawa berwarna hijau.

Koper-koper itu lantas dibawa ke dalam tiga mobil berbeda. Kemudian para penyidik meninggalkan lokasi rumah dengan nomor 26 tersebut.

Selain koper, Tessa mengungkap KPK juga mendapatkan sejumlah dokumen. Ada pula bukti elektronik yang dibawa KPK.

"Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik," ujar Tessa.

KPK belum membeberkan isi dokumen yang disita dari rumah Djan Faridz serta kaitannya di kasus Harun Masiku. Tessa menyebutkan penyidik KPK telah mengantongi bukti permulaan saat akan menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

"Tentunya apa yang ditanyakan masih dialami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi maupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan tadi malam," jelas Tessa.

Tessa juga menjelaskan alasan KPK menggeledah rumah kader PPP



Petugas KPK membawa koper saat melakukan penggeledahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (23/1/2025) dini hari. (Ist.ant)

tersebut. Dia mengatakan penyidik telah memiliki petunjuk sebelum akhirnya menggeledah rumah Djan Faridz.

"Penyidik memiliki informasi maupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan tadi malam," kata Tessa.

Tessa mengatakan penyidik KPK menyita dokumen hingga barang elektronik dari penggeledahan di rumah Djan Faridz. Barang bukti itu saat ini didalam penyidik.

"Pasti akan ditanya barang bukti elektronik itu apa? Sampai dengan saat ini belum ada informasi tambahan apakah bentuknya hardisk, laptop, handphone, itu belum terkonfirmasi penyidik kepada saya," ujar Tessa.

Sejumlah kabar muncul terkait keterlibatan Djan Faridz dan Hasto di kasus Harun hingga rumahnya digeledah KPK. Rumah di Menteng itu disebut pernah disewa oleh Hasto Kristiyanto. "Belum terkonfirmasi sama penyidik," ujar Tessa saat ditanya kebenarannya.

KPK mengaku membuka peluang memeriksa Djan Faridz sebagai saksi. Djan Faridz akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku (buron) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.

"Ya bila penyidik merasa hal tersebut diperlukan, maka tentunya saksi siapa pun akan dipanggil untuk dimintakan keterangannya," ujar Tessa.

**PPP Terkejut**

PPP, lewat Sekjennya Arwani Thomafi, ikut bersuara terkait

penggeledahan tersebut. Arwani mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut."Kami terkejut dengan penggeledahan oleh KPK di kediaman Beliau," kata Arwani.

Arwani mengaku belum bertanya lebih lanjut kepada Djan Faridz terkait penggeledahan tersebut. Dia memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan Djan Faridz.

"Saya belum mendapatkan informasi dari Beliau terkait penggeledahan tersebut. Sebagai kader, tentu kami akan komunikasi terkait hal tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut, Arwani juga memastikan PPP menghormati proses yang tengah dilakukan oleh KPK. "Kami menghormati sepenuhnya apa yang menjadi proses penegakan hukum oleh KPK," imbuhnya.

Kasus Harun sempat mandek setelah yang bersangkutan menyembunyikan diri usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 8 Januari 2020. Pada Januari 2025, politikus PDIP itu genap lima tahun menjadi buron.

Harun menjadi target OTT KPK karena diduga menyuap Wahyu Setiawan agar bisa lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak menghilang usai lolos dari OTT, ia terus bersembunyi. Ia sempat dilaporkan bersembunyi di Kamboja dan beberapa menyebut ia ada di Indonesia.

Persis lima tahun kemudian, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka suap yang melibatkan Harun Masiku terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka yang terkait dengan kasus Harun Masiku berdasarkan dua surat

perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka yang terkait dengan kasus Harun Masiku berdasarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Sprindik pertama, bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, menyebut keterlibatan Hasto dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI dari Dapil I Sumatera Selatan.

Sementara itu, sprindik kedua bernomor Sprin. Dik / 152/DIK.00/01/12/2024 menyatakan Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Terbaru, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap kader PDI-P Saeful Bahri, Kamis (23/1/2025). Saeful akan diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, eks kader PDI-P Harun Masiku, dan advokat Donny Tri Istiqomah.

"Pemeriksaan sebagai saksi lanjutan sprindik HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya.

Sebelumnya, Saeful Bahri telah memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025), tetapi belum diketahui materi pemeriksaannya. (wid, din, ist, ant, rls/dya)

# Agung Sedayu Akui Kantongi SHGB di Laut Tangerang, Klaim Beli Tanah Warga



TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta nelayan membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, yang ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan. (Ist. Antara)

**JAKARTA** - Agung Sedayu Group akhirnya mengakui anak usaha mereka; PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di sebagian daerah pagar laut pesisir Tangerang.

Tapi mereka melawan dengan menepis berbagai tuduhan. Ditegaskan, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikantongi sah. Bahkan secara rutin pajaknya pun dibayarkan. Wilayah yang mereka miliki, sebelumnya merupakan lahan milik warga. Awalnya berupa tambak atau sawah yang terabrasi tapi belum musnah, sebab masih diketahui batas-batasnya dalam posisi terkavling. Bukan lautan seperti yang dinarasikan.

Tak hanya itu, pagar laut bersertifikat HGB milik Agung Sedayu Group hanya berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Tidak semua, sepanjang kurang lebih 30 kilometer pagar yang melewati 6 kecamatan. Di sisi lain, ditegaskan bila tidak ada keterlibatan PIK 2 (Pantai Indah Kapuk)--proyek dimulai 2024--dalam pembuatan pagar laut yang ada sejak 2014 itu.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid mengatakan, pagar laut yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mereka miliki, sebelumnya merupakan daratan, bukan lautan.

Ia mengatakan, daratan itu terabrasi sehingga menjadi laut. "Perhatikan ucapan pernyataan Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) yang memerintahkan Dirjen SPPN untuk berkoordinasi dan mengecek dengan badan Lembaga Informasi Geospasial mengenai garis pantai desa Kohod, apakah sertifikat HGB dan SHM berada di dalam garis pantai atau

di luar," kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/1/2025).

Menurut Muannas, setelah dilakukan pengecekan dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan tahun 1982, posisi pagar laut pada saat itu adalah daratan.

Pihaknya juga mencocokkan dengan Google Earth, yang menunjukkan lahan SHGB dan SHM yang terkavling di sekitar kawasan pagar bambu di Desa Kohod, bukan lah laut. Dulunya tempat itu adalah lahan bekas tambak atau sawah yang terabrasi.

"Kemudian cocokkan dengan Google Earth yang SHGB dan SHM yang terkavling di sekitar pagar bambu, semua jelas menunjukkan bukan laut yang disertifikatkan, tapi lahan warga yang terabrasi lalu dialihkan sudah menjadi SHGB PT dan beberapa SHM di antaranya milik warga yang hari ini di soal," katanya.

"Di mana masalahnya kalo SHGB dan SHM terbit itu adalah lahan milik warga awalnya berupa tambak atau sawah yang terabrasi tapi belum musnah, sebab masih diketahui batas-batasnya dalam posisi terkavling yang kemudian sudah dialihkan menjadi SHGB PT," ungkap Muannas.

## Dua Menteri Terseret

Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Tangerang, Banten, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk diketahui, penemuan 280 sertifikat HGB maupun SHM di atas area laut yang dipagari di Desa Kohod itu memicu polemik di tengah

masyarakat. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menginstruksikan pembongkaran pagar laut itu.

Adapun Boyamin tiba di KPK Kamis (23/1/2025) siang, untuk menyerahkan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi pada penerbitan HGB maupun SHM di atas area laut itu. Dia mengaku belum menyertakan bukti apapun selain pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal pencabutan HGB dan SHM yang penerbitannya diduga melanggar etik.

"Saya belum percaya sepenuhnya dicabut atau tidak. Tapi saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Boyamin menjelaskan, penggunaan pasal 9 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) itu lantaran pernyataan Menteri Nusron soal dugaan cacat formil bahkan materil dalam penerbitan 263 HGB dan 17 SHM pagar laut itu. Dia menduga ada sejumlah praktik pemalsuan surat pertanahan.

Apabila merujuk pada UU No.20/2001 tentang Tipikor, terdapat pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Mereka juga terancam denda paling sedikit Rp50

## PEMILIK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) PAGAR LAUT DI KAWASAN PESISIR UTARA KABUPATEN TANGERANG, BANTEN

### PT Intan Agung Makmur

○ Terdaftar sebagai pemilik perusahaan tersebut, PT Kusuma Anugrah Abadi dan PT Inti Indah Raya.

■ Komisaris Utama:  
**Freddy Numberi**

■ Direktur:  
**Belly Djaliel**

### PT Intan Agung Makmur

○ Terdaftar sebagai pemilik perusahaan tersebut di antaranya, PT Agung Sedayu Group, PT Tunas Mekar, Pantai Indah Kapuk 2, dan beberapa orang lain.

■ Komisaris Utama:  
**Kho Cing Siong**

■ Komisaris:  
**Freddy Numberi**

■ Direktur Utama:  
**Nono Sampono PT Cahaya**

■ Direktur:  
**Belly Djaliel, Surya Pranowo Budihadjo Yohanes Edmond Budiman Inti Sentosa**

\* Data AHU Perusahaan diakses 20 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

juta, dan paling banyak Rp250 juta.

Adapun Boyamin dalam laporannya turut menyertakan sejumlah pihak terlapor dan pihak-pihak yang perlu dimintai klarifikasi. Pihak terlapor yakni oknum kepala desa, kantor kecamatan hingga kantor pertanahan setempat yang mengeluarkan HGB dan SHM untuk pagar laut itu.

Kemudian, pihak-pihak yang turut dinilai perlu dimintai klarifikasi di antaranya Menteri ATR/BPN sebelum Nusron Wahid. Hal itu lantaran HGB dan SHM yang diterbitkan untuk pagar laut tersebut bukan pada 2024, atau saat Nusron menjabat. Namun Boyamin tak memerinci siapa Menteri ATR yang dimasukkannya ke daftar pihak yang perlu diklarifikasi oleh KPK nantinya.

"Ada dua Menteri, yang jelas bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang sepuluh persen Menteri B. Artinya yang Menteri awal itu mendatangkan sekitar 90% dari 200 sekian [HGB dan SHM, red] tadi. Yang 10% Menteri setelahnya," ungkap Boyamin. (din, wid rls, ant, kum/dya)